

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GALANG BARU KOTA BATAM

Syarifuddin¹, Rahmayandi Mulda²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,
Indonesia

syarif@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,
Indonesia

rahmayandim@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam dengan studi kasus penggunaan alat kontrasepsi di kelurahan Galang Baru menjadi salah perhatian serius bagi pemerintah daerah Kota Batam karena di kelurahan tersebut jika dibandingkan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Galang termasuk wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk yang paling banyak yakni mencapai 1.455.000 penduduk perempuan dan laki-laki mencapai 1.226.000 dengan total jumlah penduduk 2.681.000. Jumlah penduduk tersebut berada di pulau-pulau yang ada di Kota Batam. Indikator penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwar III yakni indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif Kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat melalui pengamatan wawancara, dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Komunikasi Informasi dalam hal Edukasi masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik. b. Sumber Daya Manusia cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit. c. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode, namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan angka prevalensinya juga menurun. d. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penduduk, Kontrasepsi.

Abstract

The implementation of policies to control population growth in Batam City with a case study of contraceptive use in Galang Baru Kelurahan has become a serious concern for the Batam City regional government because in that kelurahan compared to other kelurahan in Galang Subdistrict, including areas experiencing population growth or population. the most reaching 1,455,000 women and men reaching 1,226,000 people with a total population of 2,681,000. The population is located on the islands in Batam City. This research indicator uses the theory of Edwar III policy implementation, namely indicators of Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. This research method uses descriptive qualitative method. Descriptive ie the data collected is in the form of words, images, and not numbers. Qualitative Descriptive is a fact finding with the right interpretation through interview observation, and document review. The results of the study can be concluded as follows: a. Education Information Communication is still lacking in delivering information and services to the public. b. Human Resources are quite good regarding cooperation with partners but not good regarding family planning fieldworkers because of their small numbers. c. Disposition is realized when seen from active participants of all methods, but when viewed from each method of contraception there are 2 (two) which are not realized, namely MOP and condom, and the prevalence also decreases. d. The bureaucratic structure is already good because it has been implemented according to Mayor Regulation Government.

Keywords: Implementation, Policy, Population, Contraception.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, menyatakan bahwa kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan hidup. Kondisi pertumbuhan penduduk hingga saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah baik di tingkat pusat hingga pemerintah daerah, Dalam menanggulangi laju pertumbuhan penduduk, pemerintah pusat melakukan berbagai langkah-langkah strategis dalam menangani masalah tersebut, salah satu diantaranya penggunaan kontrasepsi jangka panjang bagi pasangan suami istri.

Permasalahan utama kependudukan adalah ledakan penduduk dan tingginya tingkat kemiskinan. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN (Pasal 53 UU PKPK).

Menurut George W. Barclay terjemahan Rozy Munir dan Budiarto (1990) Penduduk adalah kumpulan manusia dan perhitungannya disusun menurut berbagai bentuk statistik tertentu. Fahmi (2010) mengemukakan suatu pendapat yang tercantum dalam bukunya yang berjudul “*An Essay on the Principle of Population*” ia menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan. Malthus berpendapat bahwa sebab utama timbulnya kemiskinan bukan semata-mata karena kesalahan organisasi masyarakat, tetapi semata-mata karena kesalahan manusia itu sendiri, yang tidak mau membatasi pertumbuhannya.

Menurut Maltus (dalam Ana Diro Dkk 2014, dalam Prasetio Dkk 2013) ada 2 cara pengendalian penduduk, yaitu: 1. *Positive check* yaitu cara pengendalian yang tidak moralis dan tidak dapat dikontrol seperti perang, wabah, atau perlakuan manusia lainnya yang tidak berperikemanusiaan. 2. *Preventive check* yaitu dengan pengekan moral dalam membatasi kelahiran (*birth control*) dengan cara menunda atau pendewasaan usia perkawinan (PUP)

Kebijakan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Batam yaitu melalui Program Keluarga Berencana.

Kebijakan pemerintah tentang pengendalian jumlah penduduk dinilai sangat serius karena masyarakat Indonesia saat ini mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, selain itu letak masalahnya adalah pertumbuhan penduduk berada pada masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KKB merupakan urusan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

Dasar hukum yang mengatur tentang kependudukan telah diatur dalam Aturan Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. PP RI No. 87 Th 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana. Sistem Informasi Keluarga. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (KKB). Keseriusan pemerintah dalam menyikapi masalah kependudukan di Indonesia dapat dilihat dengan berbagai aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Kerjasama pendidikan kependudukan dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku, pendidikan kependudukan, keluarga dan masyarakat tentang masalah kependudukan (formal, informal, non-formal) terhadap dampak laju pertumbuhan penduduk sangat perlu ditekankan kepada masyarakat. Analisis dampak kependudukan arahnya kependudukan terhadap pembangunan untuk mengetahui hubungan timbal balik tentang pengaruh kependudukan terhadap berbagai sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, lingkungan.

Beberapa langkah strategi pengendalian penduduk yang dilakukan pemerintah selama ini adalah meningkatkan koordinasi dan kemitraan, kepada PPK koalisi kependudukan, dunia pendidikan dan berbagai stakeholder yang terlibat didalamnya sehingga kebijakan tersebut saling bersinergi satu sama lain. selain itu dalam meningkatkan kapasitas pengelola dan mitra kerja di bidang kependudukan sangat perlu adanya pelatihan, penyuluhan, pendampingan, orientasi, dan lain-lain, selain melakukan advokasi, sosialisasi, promosi, dan fasilitasi kepada segenap stakeholders baik dengan pihak swasta maupun instansi pemerintah lainnya tentang program pengendalian penduduk dalam pembangunan berwawasan kependudukan unggul dan maju.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pengendalian kependudukan yakni Jumlah atau kuantitas penduduk, kualitas penduduk, jumlah struktur persebaran, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kelahiran, kematian dan migrasi. Program pengendalian penduduk di Kota Batam utamanya di wilayah pulau-pulau (hinterland), menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah karena wilayah-wilayah tersebut masih sangat rentang terhadap laju pertumbuhan penduduk karena wilayah demokratis yang sangat mendukung, selain itu laju pertumbuhan penduduk sangat dipertahatkan karena jika semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk di wilayah pulau-pulau tersebut akan memunculkan berbagai persoalan karena dukungan terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun lapangan kerja masih sangat terbatas, sehingga bisa memunculkan masalah baru baik dalam bidang kesehatan, kualitas sumber daya manusia maupun tingkat pengangguran akan semakin meninggi diwilayah pulau-pulau tersebut.

Penduduk yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan 2016 mencapai hampir seribu jiwa dan jika tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada wilayah Kecamatan Galang khususnya di Kelurahan Galang Baru, merupakan wilayah pulau yang ada di Kota Batam yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan program Keluarga Berencana (KB) khususnya program alat kontrasepsi jangka panjang karena pada wilayah tersebut merupakan wilayah kepulauan yang cukup rentang dengan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Batam dan pada wilayah tersebut merupakan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dimana akses menuju pulau-pulau tersebut cukup sulit karena alat transportasi masi sangat terbatas dan seperti yang diungkapkan sebelumnya baik dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan maupun lapangan kerja

masih sangat minim, sehingga jika laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut tinggi, dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat yang tidak terlayani dengan baik, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi di wilayah tersebut.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan mengacu pada sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Galang Baru merupakan daerah pulau yang mengalami jumlah penduduk terbanyak yang berada di Kecamatan Galang yakni untuk perempuan mencapai 1.455.000, dan laki-laki mencapai 1.226.000 dengan total jumlah penduduk 2.681.000. Dari data yang ada pihak pemerintah daerah Kota Batam dalam mengendalikan jumlah penduduk yang ada di daerah pulau-pulau khususnya di kelurahan Galang Baru mencanangkan program program Alat kontrasepsi jangka panjang, sehingga pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dengan baik.

Permasalahan kependudukan di Pulau Galang Baru menjadi perhatian serius karena pasilitas seperti pendidikan dan kesehatan belum memadai karena diwilayah tersebut untuk di Kelurahan Galang Baru belum ada pasilitas tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) jadi anak-anak sekolah di Kelurahan Sijantung yang jaraknya cukup jauh dari kelurahan Galang Baru, begitupun dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah tersebut belum ada .

Pasilitas kesehatan sama halnya dengan pendidikan, puskesmas untuk diwilayah tersebut belum ada, yang tersedia hanyalah Posiandu itupun tenaga kesehatannya sangat minim dan pada umumnya kurang betah tinggal diwilayah tersebut. Pusat kesehatan masyarakat jaraknya cukup jauh berada di Kelurahan Sembulang yang jaraknya kurang lebih 25 Km, sebagian masyarakat bisa menempuh menggunakan perahu dan jalan darat (kendaraan bermotor).

METODELOGI

Metode Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif Kualitatif adalah pecarian fakta dengan interpretasi yang tepat melalui pengamatan wawancara dan penelaahan dokumen.

Menurut Sugiano (2010) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan Penyampaian atau perubahan energi dari satu tempat ketempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Dalam arti lain penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh organisme atau berupa pesan yang disampaikan.

Proses komunikasi kebijakan atau ditransmisi secara konsisten kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apanila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resestensi dari kelompok sasaran keberhasilan program Keluarga Berencana di Indonesia. Komunikasi merupakan yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan agar kelompok-kelompok sasaran dapat memahami konsep kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.

Salah satu permasalahan umum dalam sebuah kebijakan adalah komunikasi, yakni kebijakan yang seharusnya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat namun karena terhambat oleh proses komunikasi sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sosialisasi kebijakan dapat diartikan sebagai komunikasi kelompok merupakan proses mempertemukan dan penyatuan pemikiran, pendapat dan gagasan melalui kegiatan rapat maupun diskusi sehingga informasi, pengetahuan dan kebersamaan dalam sebuah perusahaan dapat tersalurkan, berjalan, dan terjaga (terkelola) dengan baik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak Kota Batam serta BKKBN sering mengadakan sosialisasi program keluarga berencana agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dan mengikuti program keluarga berencana sehingga program keluarga berencana dapat berjalan lancar dan terealisasi. Selain itu program yang dilaksanakan yakni menyusun Program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), melaksanakan sosialisasi melalui kegiatan seperti

kegiatan pelayanan KB dalam rangka memperingati hari ibu dan anak, serta beberapa kegiatan pelayanan KB secara serentak dalam rangka hari keluarga.

Dari pengamatan peneliti dilapangan melihat bahwa permasalahan komunikasi yang ada di Kelurahan Galang Baru dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dijelaskan peneliti sebagai berikut:

1. Kondisi Alam

Kondisi alam menjadi penyebab sebuah proses komunikasi tidak berjalan dengan baik karena medan atau lokasi yang ditempuh cukup sulit seperti kerusakan jalan, jarak tempuh yang cukup jauh, kondisi cuaca yang tidak menentu seperti hujan, badai, ancaman atau gangguan dari binatang buas dan lain sebagainya.

Keadaan seperti diatas memiliki resiko yang cukup besar dalam melakukan proses komunikasi sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi kebijakan keseluruhan lapisan masyarakat utamanya masyarakat kecil yang tinggal daerah-daerah tertentu.

Kondisi alam kelurahan Galang Baru terdiri dari berbagai pulau-pulau dan masyarakat pada umumnya tinggal di pulau-pulau tersebut. Pada umumnya masyarakat bekerja di sektor perikanan atau nelayan, dalam melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah kelurahan Galang Baru cukup kesulitan karena masyarakatnya terpisah-pisah antara pulau satu dengan yang lainnya, selain itu alat komunikasi seperti jaringan telepon belum maksimal.

2. Daya Jangkau atau Jarak

Jangkauan atau jarak dalam melakukan proses komunikasi menjadi masalah yang cukup serius karena sangat berpengaruh terhadap objek atau penerima pesan. Jarak disini dapat diartikan sebagai daya jangkau yang membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama, besar dan tinggi sehingga proses komunikasi atau sosialisasi menjadi terhambat.

Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan wilayah Kelurahan Galang Baru jika dilihat dari kondisi wilayah untuk melakukan sosialisasi program tersebut cukup sulit karena salah satu faktornya adalah wilayahnya cukup jauh dari pusat pemerintahan dan masyarakat tersebar di beberapa pulau yang ada di pulau Galang.

3. Dukungan Anggaran

Dalam melakukan sosialisasi atau proses komunikasi kebijakan dengan jarak tempuh yang cukup jauh menjadi penghambat. Kecamatan Galang Kelurahan Galang Baru daya tempuhnya rata-rata dari pusat pemerintahan memakan waktu dua jam lebih, belum lagi masuk di wilayah pulau-pulau yang harus menggunakan transportasi laut. Secara waktu dan

biaya sangat besar yang harus dikeluarkan, dari segi waktu dari segi waktu perjalanan bisa sampai tiga sampai empat jam, dan dari segi biaya bisa sampai puluhan juta.

Pendanaan atau anggaran dalam melakukan proses komunikasi atau sosialisasi sangat penting karena untuk memperlancar proses kegiatan tersebut. Anggaran merupakan instrumen penting yang dimiliki negara untuk menjalankan kewajibannya. Anggaran merupakan Ranah strategis yang menentukan pemenuhan dan penghargaan terhadap hak asasi warga dengan memperhatikan aspek *progressive realization* dan *full use of maximum available resource*.

Realisasi dalam kebijakan anggaran adalah pemerintah wajib semaksimal mungkin menggunakan sumber-sumber pendapatan anggaran pemerintah untuk pembelanjaan terkait dengan pemenuhan HAM seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan. perwujudannya dalam kebijakan anggaran berupa kewajiban pemerintah untuk terus menerus meningkatkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan sosial. Peningkatan ini adalah nilai riil. Bukan menyesuaikan inflasi.

Komunikasi atau sosialisasi dalam program keluarga Berencana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam terkait dengan program Komunikasi Informasi Edukasi jika diamati berdasarkan peraturan yang ada pada hakikatnya *output* dari hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dirasakan masih kurang bagi masyarakat karena sosialisasinya masih kurang merata, kurangnya penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik belum sesuai dengan visi dan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana “Menuju masyarakat partisipatif dan berkeadilan Gender serta keluarga berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.”

Dukungan anggaran menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam penghambat proses sosialisasi kebijakan karena wilayah tersebut aksesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan kondisi wilayah yang berada dan menyebar di pulau-pulau kecil, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Sumberdaya

Sumber daya dalam yang dimaksud pada penelitian ini adalah sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor

penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya birokrasi memiliki posisi dan peranannya yang sedemikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan terwujudnya efisiensi, efektivitas dan kualitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sumber daya birokrasi sangat berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi dalam proses implentasi kebijakan, jika dukungan anggaran sangat terbatas hal tersebut dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan akan terhambat dan mengalami masalah. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah daerah dalam pemenuhan sumber daya dan anggaran harus menjadi prioritas dalam menentukan kesuksesan atau kelancaran sebuah kebijakan.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk masih diaggap kurang karena satu PLKB memegang satu desa, standarnya satu desa dipegang oleh dua PLKB, sedangkan untuk sumber dana anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga masih dinilai sangat kurang karena wilayah kepulauan cukup berat karena menggunakan transportasi laut dan sifatnya menggunakan transportasi sewaan, untuk sumber daya peralatan meliputi sound sistem, alat peraga, tensi darah, suntikan, alat-alat kontrasepsi, baner dan spanduk dianggap sudah lengkap.

Tabel 1. Sumber Daya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

No	Nama	Tugas dan Fungsi	Instansi
1	Umiati SE	Penanggungjawab kebijakan di tingkat Kota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, KB.
2	Syahril	Penanggungjawab kebijakan tingkat Kelurahan	Lurah Kelurahan Galang Baru
3	M. Nizam	Pelaksana tingkat Kelurahan	Kelurahan Galang
4	Hamidah	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Dinas Kesehatan
5	Nurlela	Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa.	Masyarakat

Dari pengamatan peneliti dilapangan menemukan bahwa terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam program pengendalian jumlah penduduk di kelurahan

Galang Baru karena untuk di kelurahan sendiri terdapat satu orang yang menjadi pelaksana teknis dilapangan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk dari Dinas hanya ada dua orang yakni PLKB dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa di masyarakat. Sedangkan wilayah yang ada di Galang Baru wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga daya jangkau dengan tenaga lapangan sangat terbatas.

Disposisi

Sikap atau langkah yang dilakukan oleh pelaksana tugas pengendalian penduduk atau petugas KB dengan cara meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan karena hal ini cukup rentan terhadap kematian ibu hamil dan anak, meningkatkan kepedulian dan peran serta Pasangan Usia Subur sebagai peserta KB selain itu juga melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja, Kesertaan KB Pria yakni Medis Operasi Pria program lain yakni mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera, meningkatkan keterampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pulau-pulau tersebut dan menurunkan *unmetneed* serta *drop out* peserta KB, meningkatkan penyuluhan dan konseling pelayanan KB ditempat tempat pelayanan KB seperti Posyandu atau balai kampung untuk mewujudkan kepuasan pasangan usia subur, menggunakan alat kontrasepsi serta mencegah timbulnya kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat penggunaan alat kontasepsi.

Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana terealisasi cukup baik jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode, namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan prevalensinya juga menurun. Hal tersebut disebabkan ketersediaan alat dan kebiasaan dari masyarakat setempat.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

1. BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

BKKBN Provinsi Kepulauan Riau merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pengendalian penduduk di wilayah provinsi yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan program tersebut. Sebagai pelaksana tugas di daerah dalam mengkordasikan program pemerintah pusat, BKKBN Provinsi terlibat langsung dalam menjalankan program pengendalian penduduk bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang terkait adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.

Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan untuk Kabupaten/kota pelaksanaan programnya diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga menjadikan daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga teknis daerah dalam Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam sebagaimana telah ada pada Peraturan Daerah Kota Batam, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat strategis sebagai koordinator perencanaan pembangunan di Kota Batam. Maka dari itu tuntutan profesionalitas, akuntabilitas dan efektivitas menjadi bentuk yang tidak dapat dihindarkan dalam mekanisme kerjanya.

2. Pemerintah Kota Batam

Pelaksana tugas di lingkup pemerintah daerah dalam program pengendalian penduduk adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan BKKBN Provinsi. Dinas kesehatan dalam menyelenggarakan program ini menempatkan tenaga teknis atau tenaga lapangan di tiap kelurahan atau desa sebagai penyuluh program.

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam menetapkan sebuah Visi yakni:

“Terwujudnya Kesetaraan, Keadilan Gender dan Keluarga Berencana menuju Masyarakat Sejahtera”

Dari visi diatas kemudian merumuskan sebuah misi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan memperkuat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.
2. Melakukan upaya Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. Peningkatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Batam Faktor pendukung sama dengan kekuatan di BPMPKB Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja.
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta Pasangan Usia Subur sebagai peserta KB untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera.
3. Meningkatnya ketrampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pedesaan untuk menurunkan unmet need serta drop out peserta KB.
4. Meningkatnya penyuluhan dan konseling pelayanan KB di tempat-tempat pelayanan KB untuk mewujudkan kepuasan Peserta Usia Subur menggunakan alat kontrasepsi serta mencegah timbulnya kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat penggunaan alat kontrasepsi.

Faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Batam Faktor penghambat sama dengan kelemahan di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB.
2. Beban tugas Petugas Lapangan Penyuluh KB yang semakin bertambah berat karena bentuk kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah KB Kota Batam masih bergabung dengan beberapa unsur instansi yang lain.
3. Kesertaan KB Pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria karena masih kuatnya persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program KB adalah urusan perempuan.
4. Peserta KB aktif masih didominasi oleh metode kontrasepsi suntik karena masyarakat Batam lebih menginginkan pelayanan KB yang bersifat praktis dan mudah didapat disekitar tempat tinggalnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2010-2015. Program Pembangunan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kota Batam, bertujuan untuk memantapkan kelangsungan program dan kelembagaan serta peningkatan kinerja program di setiap wilayah untuk pemenuhan permintaan masyarakat akan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dalam rangka membantu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Kebijakan dilaksanakan untuk mencapai Program Keluarga Berencana melalui: 1) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja. 2) Meningkatkan kepedulian dan peran serta Pasangan Usia Subur (PUS) sebagai peserta KB untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. 3) Meningkatkan keterampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah pedesaan untuk menurunkan unmetneed serta drop out peserta KB. 4) Meningkatkan penyuluhan dan konseling pelayanan KB ditempat tempat pelayanan KB untuk mewujudkan kepuasan PUS menggunakan alat kontrasepsi serta mencegah timbulnya kasus efek samping, komplikasi dan kegagalan.

3. Pemerintah Kelurahan Galang Baru

Pemerintah Kelurahan Galang Baru dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

(P3AP2KB) di setiap hari peringatan/momen tertentu yang ada di Batam seperti peringatan Hari Ibu dan Anak, tidak hanya di masyarakat desa/kecamatan, momen-momen tertentu cukup banyak seperti pada saat hari jadi Kecamatan Galang atau Kelurahan Galang Baru, hari kartini serta hari peringatan lainnya.

Laju Pertumbuhan Penduduk masih sangat tinggi sehingga hal ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Dalam mengatasi adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di kelurahan Galang Baru Kota Batam melalui pogram keluarga berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam (P3AP2KB) dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan (Wali Kota, Legislatif dan Internal Organisasi), pemantapan organisasi kelembagaan dan peningkatan pelaksanaan program keluarga berencana dengan menambahkan jumlah petugas lapangan keluarga berencana yakni pembantu PLKB, selain itu menambah mitra kerja agar jaringan untuk sosialisasi lebih luas, terus mensosialisasikan program keluarga berencana untuk pria terutama Medis Operasi Pria (MOP).

Tabel berikut merupakan hasil program pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana di Kelurahan Galang Baru tahun 2017 pada tabel tersebut menunjukkan bahwa program KB belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor sudah disebutkan sebelumnya termasuk mengenai sumber daya manusia yang jumlahnya sangat terbatas selain itu letak geografis yang sulit untuk dijangkau.

Tabel 2. Data Jumlah Peserta KB di Kelurahan Galang Baru Th. 2017

No.	RW/ Dusun	RT	Jumlah jiwa dalam keluarga		Jumlah jiwa		Jumlah PUS	
			Yg ada	Yg didata	L	P	Peserta KB	Bukan KB
1	001	4	196	205	358	325	70	59
2	002	2	101	101	212	177	30	39
3	003	3	124	115	209	190	49	22
4	004	3	233	227	434	377	94	61
5	005	3	177	175	332	288	71	50
6	006	2	79	78	140	138	36	17

Sumber: Kantor Kelurahan Galang Baru

Pemerintah kelurahan Galang Baru beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam (P3AP2KB) terus berupaya keras dalam menekan pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah tersebut karena dukungan sarana maupun prasarana belum mendukung sepenuhnya seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan serta lapangan kerja.

Hal yang takutkan oleh pemerintah jika diwilayah tersebut terus mengalami ledakan jumlah penduduk maka dikawatirkan masalah sosial akan semakin meningkat seperti kriminalitas, kesehatan, dan peningkatan jumlah pengangguran diwilayah tersebut.

Dari pengamatan peneliti dilapangan melihat bahwa program pengendalian penduduk sudah berjalan dengan baik namun yang menjadi persoalan adalah dukungan anggaran dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap program KB belum dipahami sepenuhnya. Selain itu kondisi wilayah yang terdiri dari wilayah pulau-pulau masyarakatnya yang terpisah-pisah mengakibatkan arus informasi tidak menyebar dengan baik.

Kondisi yang dialami oleh masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan program keluarga berencana cukup banyak tantangan yang harus dihadapi namun pemerintah daerah terus berusaha agar program ini terus berjalan dengan baik. Jika melihat keberhasilan kebijakan program pengendalian penduduk di Kota Batam khususnya diwilayah Galang Baru butuh kerja keras dan keterlibatan semua pihak karena permasalahan ini memiliki banyak aspek yang harus dilihat, baik dari kondisi geografis, kondisi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Dari permasalahan implementasi kebijakan pengendalian jumlah penduduk di Galang Baru cukup jelas yakni masalah kondisi wilayah, masyarakat dan dukungan anggaran terkait dengan pelaksana atau implementator mereka cukup semangat kerja namun penuh dengan keterbatasan dan terkait dengan keberhasilan realisasi kinerja belum berjalan secara maksimal karena tingkat pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan namun tiap tahunnya, jika dilihat dari tahun 2016 ketahun 2017 telah mengalami peningkatan tapi dari tahun 2015 ke tahun 2016 kenaikannya cukup tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan terhadap “Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di kelurahan Galang Baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Komunikasi sudah dijalankan dengan baik namun dianggap kurang maksimal karena keterbatasan anggaran dan kondisi wilayah yang berada di pulau-pulau kecil serta jarak tempuhnya cukup menggunakan waktu lama.
2. Sumber Daya Manusia dan Anggaran dari kualitas cukup baik namun kuantitas masih sangat kurang, sedangkan penganggaran masih sangat terbatas.
3. Disposisi, dinilai cukup baik karena peserta keluarga berencana cukup aktif dalam program KB tersebut.
4. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan. Kinerja para implementator sudah dijalankan dengan baik namun masih terkendala pada anggaran dan kondisi wilayah serta kondisi masyarakat. Kinerja yang sudah dilakukan yakni meningkatnya penyuluhan dan konseling Pelayanan KB di tempat-tempat pelayanan KB sedangkan faktor lain yang menghambat adalah berkurangnya Petugas Lapangan Penyuluh KB (PLPKB), beban tugas petugas lapangan penyuluh KB yang semakin bertambah berat, kesertaan KB Pria. Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan. Masih rendah terutama medis Operasi Pria (MOP) masih rendah

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Diro Arsiyah Zeini Mahbub. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Sidoarjo*. Program Studi Administrasi Negara - FISIP - Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol 2 (1). 1-102.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Jumlah Penduduk Kota Batam.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy Washington DC: Congressional Quarterly Press*.
- Munir, Rozy & Budiarto. (1990). *Teknik Analisa Kependudukan I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2015 – 2019.
- Sugiono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pemerintah Kelurahan Galang Baru. (2018). *Data Jumlah Peserta KB di Kelurahan Galang Baru Tahun 2017*. Kota Batam